

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
DI DESA MOROBAKUNG KECAMATAN MANYAR KABUPATEN  
GRESIK**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh:

**ASMAUL HUSNAH**  
**2015310517**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2019**


### PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Asmaul Husnah  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 11 September 1997  
N.I.M : 2015310517  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Judul : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa (ADD) di Desa Morobakung Kecamatan  
Manyar Kabupaten Gresik

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

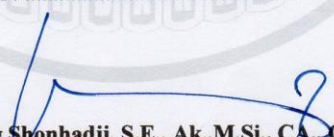
Tanggal : 12 September 2019

  
**(Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., MM., CA., AAP-B)**

NIDN: 0719105901

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 12 September 2019

  
**(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)**

# **ANALYSIS ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT (ADD) IN VILLAGE MOROBAKUNG MANYAR DISTRICT GRESIK REGENCY IN 2018**

Asmaul Husnah  
2015310517

Email: [anaasmh100@gmail.com](mailto:anaasmh100@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Government Accounting is a field of accounting that is managed by the government which has three main objectives, including accountability, managerial, and supervision. This study focuses on the analysis of the responsibility for managing village fund allocation in the village of Morobakung, Manyar Regency, Gresik Regency. Accountability carried out by the government is an embodiment of providing information from every action or activity with financial management carried out by the government. The Village Fund Allocation is a form of government responsibility to develop development at the village level. The Village Fund allocation comes from transfer income sourced from the central and regional financial balance funds received by the Regency / City. This research was carried out in Morobakung Village, Manyar District, Gresik Regency.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The purpose of this study is to measure the accountability of villages that get the amount of ADD. The description results are obtained through indicators by comparing Permendagri Law No. 113 of 2014 with actual field activities.

The results of research based on Permendagri number 113 of 2014 showed that the management of the Village Fund Allocation in Morobakung Village was already accountable at the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability with the support of communities who were actively involved in carrying out community development.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation (ADD), Village Government

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang harus ada dalam pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintahan dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang baik apabila masyarakat yang ada didalamnya sejahtera, kesejahteraan dapat dilihat dari lingkup yang paling

kecil seperti desa. Pada pemerintahan, desa diberi tanggung jawab untuk mengelola dana dari kabupaten berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan desa.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap

bagian. Tiap jajaran masing-masing bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang dapat dikatakan terkendali apabila kegiatan secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Hal itu berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil yang membutuhkan pembaharuan pembangunan agar menjadi desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat jauh dari kemiskinan. Pembangunan desa menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa mempunyai peran dan wewenang untuk mengurus, mengelola dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan dan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan perencanaan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tetap selaras. Selain itu, pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi kegiatan pembangunan desa.

Sumber dana yang diperoleh Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yaitu dari hasil Pendapatan Asli Desa (PAD)

yang meliputi Hasil Aset Desa dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Desa Morobakung mendapatkan sumber dana dari Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Alokasi Dana Desa (ADD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dana Perimbangan atau Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan lain-lain daerah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

### **Kajian Teori**

Ritzer, (1992: 5) mengungkapkan individu melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Triangulasi Sumber data yang membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan (Paton, 1987); (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan upaya yang di katajalkan secara pribadi; (3) membandingkan

apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan serta alasan terjadi perbedaan (Moleong, 2006).

### **Akuntabilitas**

Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam permendagri 113 tahun 2014 tentang asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan sesuai dengan tertib dan disiplin. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Nordiawan (2006) dalam buku Sujarweni (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada

seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Vilma,dkk (2018) akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun pemerintahan yang kecil yaitu pemerintahan desa. sebuah pemerintahan dapat dikatakan baik jika masyarakatnya sejahtera dan makmur.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan seperti lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir untuk menapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas publik ada dua macam (Mardiasmo, 2009:11) yaitu

#### **1. Akuntabilitas Vertikal**

Akuntabilitas vertikal merupakan suatu pertanggung jawaban mengenai pengelolaan dana otoritas yang lebih tinggi, contohnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### **2. Akuntabilitas Horizontal**

Akuntabilitas horizaontak merupakan suatu pertanggungjawaban yang dilakukan kepada seluruh masyarakat luas.

Sesuai permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan

### Rancangan Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:9) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemahaman dan penelitian yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena dan masalah. Pada pendekatan ini, hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek yang diteliti dan perilaku yang diamati.

Metode penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang dapat terspesifikasi secara sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga penarikan kesimpulan. Data dihimpun dengan pengamatan yang mencakup seluruh deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai dengan catatan-catatan hasil dari wawancara serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan yang terdapat dalam suatu objek.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana para pelaku dapat memahami akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berbeda melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata dan dokumentasi yang tertuang dalam hasil penelitian.

### Metode Pengumpulan Data

Data kualitatif berbentuk deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang diamati. Data kualitatif merupakan data yang uraiannya terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari suatu cerita yang diungkapkan oleh responden.

Data kualitatif adalah sebuah tangkapan atas perkataan mengenai subjek penelitian dengan sebuah penyusunan kata yang disusun sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci secara detail, sehingga dapat dikatakan bersifat panjang lebar dan bersifat spesifik.

Macam-macam data kualitatif menurut Ariesto (2010) sebagai berikut:

- a. Dokumen wawancara  
Penelitian ini dilakukan wawancara dengan pertanyaan. Pertanyaan bersifat *open-ended* sehingga responden dapat memberikan informasi yang tidak terbatas dan mendalam dari berbagai perspektif. Seluruh wawancara dibuat transkrip dan disimpan dalam *file* teks.
- b. Rekaman  
Penelitian ini dibuat rekaman audio untuk melengkapi data. Rekaman dapat digunakan untuk menggali isi video lebih dalam pada saat pengelolaan data dilakukan. Kecepatan ataupun inotasi setiap manusia berbeda, maka dari itu diperlukan adanya rekaman guna untuk mereview ulang hasil wawancara kepada responden



c. Data dari buku

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder

1. Data Primer Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Morobakung.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data dokumen pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan yang menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) harus di rencanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka kepada seluruh masyarakat desa dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program dana bantuan pemerintah yang dimaksud adalah dana yang harus diperinci penerimaannya dari Pemerintah Kabupaten yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Morobakung di salurkan secara bertahap yakni, Tahap I dengan prosentase 50% pada bulan Mei 2018 sebesar Rp. 147.484.500, sedangkan Tahap II dengan prosentase 50% pada bulan September 2018 sebesar Rp.147.484.500.

Alokasi Dana Desa yang setiap diterima oleh desa digunakan untuk dua komponen yaitu (1) sebesar 70% digunakan untuk Siltap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

### **Skema Penelitian**

Skema pembahasan di dapat dari kerangka pemikiran yang berdasarkan terhadap beberapa pertimbangan. Berdasarkan rumusan masalah bagaimana sistem akuntabilitas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ADD pada tahun 2018 oleh pemerintahan desa di desa Morobakung, dibawa ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan yang dibutuhkan. Hasil penelitian tersebut akan dianalisis berdasarkan pedoman peraturan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tersebut

### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Morobakung**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat/individu yang nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban akan berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi

dalam memberikan pelayanan kepada hak-hak yang telah dipungut langsung atau tidak langsung dari masyarakat.

Alokasi Dana Desa yang digunakan oleh Desa guna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan. Biaya tersebut meliputi biaya pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat dan BPD, biaya operasional perkantoran, biaya operasional BPD, biaya operasional RT/RW, biaya penyelenggaraan musyawarah desa, biaya penyelenggaraan rencana kerja pemerintah desa, biaya penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja desa, biaya perencanaan pembangunan desa, biaya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan, biaya pemeliharaan sarana prasarana aparatur desa, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya penyelenggaraan tim penggerak PKK, dan biaya-biaya lainnya.

Kegiatan yang di danai oleh ADD adalah 70% Pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk Penyelenggaraan Pemerintah. Sampel yang digunakan sebagai contoh adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dalam kegiatan Musyawarah Desa. Musyawarah desa menarik dipakai sebagai contoh, karena dalam pembiayaannya tidak membutuhkan pengeluaran yang banyak dan bisa dianggap remeh sehingga peneliti tertarik mengambil contoh tersebut untuk mengetahui pengelolaannya.

### **Perencanaan**

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 pasal 20 tentang

pengelolaan keuangan desa, dalam perencanaan Sekretariat desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretariat desa menyampaikan RKPDesa kepada kepala desa. Rancangan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk di bahas dan disepakati bersama.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota/Kota setelah dikurangi alokasi dana khusus. Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 di Pemerintah Desa Morobakung dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan APBDes didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Desa yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang diusulkan atau dibuat oleh Kepala Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

### **Pelaksanaan**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaan pada



setiap kegiatan oleh pengelola tingkat desa, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Contoh dalam bidang penyelenggaraan desa yaitu kegiatan musyawarah desa. Kegiatan musyawarah desa di laporkan apabila dalam bulanan terdapat Musyawarah desa dengan membahas program kerja desa dan laporan akhir bulanan tersebut dijadikan satu menjadi laporan akhir tahunan. Bukti adanya kegiatan tersebut menunjukkan dalam pelaksanaan dan pelaporan ADD sudah dilaksanakan sebagaimana dalam peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014.

#### **Penatausahaan**

Penatausahaan dalam Desa Morobakung berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa penatausahaan harus dilakukan oleh Bendahara Desa dimana desa tersebut wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Seluruh hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 35 ayat 2 tentang petunjuk teknis pengelolaan ADD, BHP dan Retribusi daerah menyatakan bahwa bendahara

desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan Alokasi Dana Desa pada Desa Morobakung sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara kepada bendahara desa yang bernama M. Faizin yang menyatakan bahwa Penatausahaan Desa Morobakung sudah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah mulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan.

#### **Pelaporan**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan berupa Laporan Semester Pertama berupa realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota yang dimana disampaikannya paling lambat bulan juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Morobakung untuk semester pertama dan terakhir sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapak Kasnan selaku Sekdes mengatakan: *“Laporan realisasi dilakukan setiap akhir bulan juli bulan berikutnya, kalau semester akhir dilakukan bulan januari bulan berikutnya”*.

Kegiatan ADD yaitu dalam Bidang penyelenggaraan masyarakat dengan program kegiatan Musyawarah Desa. Kegiatan tersebut dilaporkan dan sudah direalisasikan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumberdana pemerintahan Desa Morobakung Tahun 2018.

### **Pertanggungjawaban**

Sesuai dengan Peraturan Desa Morobakung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2016, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Morobakung tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Kegiatan ADD misalnya dalam Bidang penyelenggaraan Pemerintah dalam kegiatan Musyawarah Desa. Kegiatan tersebut sudah di rencanakan, dilaksanakan, dilakukan penatausahaan, melakukan pelaporan yang dimasukkan dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana. Bukti tersebut sudah menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Kegiatan Musyawarah Desa sudah memenuhi ketentuan dan syarat Undang-undang yang berlaku.

### **Kesimpulan**

Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Permendagri 113 tahun 2014.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan dari awal hingga akhir yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggung jawaban, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti menerangkan bahwa:

1. **Tahap Perencanaan**, dilakukan sesuai dengan prosedur dari pembuatan RPJM enam tahunan dan dilakukan musdes dilanjutkan dengan musdes dan yang terakhir musregbangdes. Musyawarah dilakukan untuk pembuatan RKPDesa yang di musdeskan di pendopo balai desa, hingga menjadi APBDesa. RAPB dilakukan mulai dari Kepala Desa hingga diserahkan ke bupati gresik melalui Camat Manyar, tetapi dalam proses perencanaan tidak terdapat bukti administrasi yang tepat. Maka Desa Morobakung dalam proses perencanaan dikatakan belum sepenuhnya *accountable*.
2. **Tahap Pelaksanaan**, pencairan ADD dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran yang telah di setujui oleh Sekertaris desa dan Kepala Desa, kemudian bendahara melakukan pembayaran. Maka Desa Morobakung dalam proses pelaksanaan dikatakan *accountable*.
3. **Tahap Penatausahaan**, Pengelolaan Keuangan Desa didalam Desa Morobakung sudah menggunakan acuan yang sesuai dengan lampiran dalam Permendagri 113 tahun 2014 mulai dari Rancangan Anggaran

Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes. Teknis dalam penatausahaan dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara sementara ini telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka Desa Morobakung dalam proses penatausahaan dikatakan *accountable*.

4. **Tahap Pelaporan,** Pengelolaan Keuangan Desa Morobakung telah terlaksana tepat waktu sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama hingga semester akhir yang berupa laporan realisasi APBDes.
5. **Tahap pertanggungjawaban,** Desa Morobakung telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan Alokasi Dana desa tahun anggaran. Pertanggungjawaban Desa Morobakung sudah melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa

pertanggungjawaban desa Morobakung sudah *accountable* atau bertanggungjawab sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka

- Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Akuntansi Dana Desa Di Kabupaten Jember*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2 (3) : 473-485.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Farida, Vilma. A Waluya Jati. dan Riska Harventy. 2018. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, Jurnal Akademi Akuntansi Volume 1 No 1.
- Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*, Volume 3 No 1 Hal : 121-137 ISSN : 2302-2019.
- Kustono, Alwan., Putri Purnamasari. dan Djoko Supatmoko. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*, Volume (2) : 141-147.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor publik*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Revida, Erika. Ermansyah. dan Iskandar Muda. 2017. *Village Governance with Implementation of law number 6 of 2014 on the Village and Village Administration*, International Journal of Economic Research Volume 14 Number 17.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- Riyanto, Teguh. 2015. *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*, e-Journal Administrasi Negara Vol 3 (1) : 119-130 ISSN : 2337-7542 .
- Ruru, Novianti. Lintje Kalangi. dan Novi. S Budiarmo. 2017. *Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*, Hal : 83-90.
- Setyoko, Paulus Israwan. 2011. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa*, Jurnal Administrasi Negara Volume 11 No 1 : 14-24.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP SKIM YKPN.
- Suaib, Eka. Bahtiar. dan Jamal Bake. 2016. *Efektivitas pengelolaan APB-Desa*, Vol 3 No 2 Hal : 282-291 ISSN 0215-8175 EISSN 2303-2499.
- Sugiyono. 2011. Alfabeta, Bandung: Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
- Sujarweni, A Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wida, Siti Ainul. Djoko Supatmoko. dan Taufik Kurrohman. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, ISSN : 2335-4665 Volume IV (2) : 148-152.
- <https://www.jawapos.com/metro/metropolis/21/08/2016/pencairan-dana-desa-tahap-dua-di-gresik-molor> di akses pada tanggal 20 Maret 2019